

ANALISIS PERENCANAAN STRATEGIS DI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dody Fitrawan

PNS Pemda Kabupaten Kuantan Singingi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan strategis dan menentukan prioritas program pembangunan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Di dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, teknik wawancara dan studi dokumentasi. Aspek-aspek untuk menganalisis perencanaan strategis adalah analisis SWOT yaitu: kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program kerja Dinas ESDM belum berjalan dengan baik, dimana program pembangunan dalam renstra lebih didominasi oleh kegiatan proyek pembangunan fisik berupa pembuatan infrastruktur bangunan seperti pembangunan jaringan instalasi listrik dan peningkatan sarana dan prasarana kantor. Selain itu, kurang adanya prioritas perencanaan program kerja di Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi, dimana selama ini program kerja didasarkan pada ketersediaan anggaran saja tanpa melihat prioritas kebutuhan yang perlu dikembangkan.

Berdasarkan peta kekuatan dalam perencanaan strategis Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis berada pada situasi strategi agresif (S-O) yaitu memanfaatkan kekuatan untuk mengisi peluang yang ada dalam penentuan program prioritas Dinas ESDM. Strategi-strategi yang merupakan hasil dari analisis faktor kekuatan dan peluang (S-O) tersebut adalah: intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan potensi ESDM, peningkatan pembangunan sarana infrastruktur ESDM dan peningkatan kemitraan dalam pengelolaan ESDM. Dari ketiga strategi (S-O) yang menjadi prioritas utama program perencanaan pembangunan di Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi adalah melakukan strategi Intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan potensi ESDM.

Saran dari hasil penelitian (1) Untuk menanggulangi penambangan liar dan kekurangan anggaran pengelolaan bidang ESDM, maka perlu dibentuk kemitraan antara masyarakat, pemerintah daerah (Dinas ESDM); (2) Perlu melakukan intensifikasi dan Ekstensifikasi bidang ESDM dengan cara mengeksplorasi kawasan laut; (3) Perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah (Dinas ESDM) dengan Kementerian ESDM dalam menyelenggarakan program kerja di daerah Kabupaten Kuantan Singingi agar tidak terjadi duplikasi kegiatan yang sama oleh dua institusi (Dinas ESDM dan Kementerian ESDM).

Kata Kunci: Perencanaan, Perencanaan Strategis

ANALYSIS OF STRATEGIC PLANNING AT THE DEPARTMENT OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES IN DISTRICT OF KUANTAN SINGINGI

Abstract

This research aims to analyze the strategic planning and prioritizing development program at the Energy and Mineral Resources Office in district of Singingi Kuantan. This research uses descriptive qualitative approach. In this research, the data collection is done through observation, interview and documentary studies. Aspects of strategic planning is to analyze the SWOT analysis: strengths, weakness, opportunities, and threats.

The results show that planning of work program at Office of ESDM in District Singingi Kuantan has not been going well, where development programs in the strategic plan is more dominated by the physical construction of the project activities such as the manufacture of building infrastructure such as electrical installation network construction and improvement of office facilities. In addition, a lack of planning priorities in the work program of the ESDM Office in district of Singingi Kuantan, during which the program is based on the availability of work budget without seeing the priority of needs to be developed.

Based on the map of power in the strategic planning at ESDM Office in District of Kuantan Singingi it can be concluded that the strategic planning in a situation of aggressive strategies (S-O) is utilize the power to fill the opportunities to determining the priorities of program at ESDM Office. Strategies that are the result of factor analysis of strengths and opportunities (SO): intensification and extension of the utilization of the ESDM potential, the increased of infrastructure development and strengthening of partnerships in the management of ESDM. Of the three strategies (SO) is a top priority in development planning program at ESDM Office in District Kuantan Singingi is pursuing a strategy of intensification and expansion of the utilization of ESDM.

Suggestions from the research are (1) In the strategic planning documents Department of Energy to keep attention to the linkages between documents; (2) the need to intensify field of ESDM by exploring the region by sea. (3) Keep doing extending the field of ESDM with a way to open a new network.

Keywords: Planning, Strategic Planning

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan misinya dalam mengatur, memberdayakan dan melayani masyarakat di daerah dengan lebih baik. Selain itu juga diharapkan dapat mencapai sasaran yakni kemakmuran bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayahnya. Diberlakukannya undang-undang tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia memiliki daerah yang memiliki karakteristik tertentu baik itu dalam hal wilayah, penduduk, sumber daya alam, dan latar belakang yang berbeda-beda. Pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi, kelebihanannya pembangunan yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah akan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan didasarkan pada sumber daya serta potensi daerah masing-masing. Dengan demikian upaya mengimplementasikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 secara optimal secara langsung juga berarti akan mendorong kemakmuran seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan di daerah yang sesuai dengan semangat otonomi daerah yang terdapat pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak dilakukan tanpa rujukan regulasi yang jelas. Oleh karena itu lahirnya undang-undang tentang pemerintahan daerah ini juga mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kabupaten Kuantan Singingi sebagai sebuah daerah otonom tentu membutuhkan perencanaan pembangunan yang strategis untuk merumuskan jati dirinya. Sebagai sebuah entitas, Kabupaten Kuantan Singingi tentu memiliki ke-khas-an yang menjadi potensi dan unggulan untuk dikembangkan. Berdasarkan potensi dan unggulan yang dimiliki, stakeholder di Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan Pertanian, Industri Pengolahan dan Pertambangan sebagai unggulan yang layak untuk dikembangkan. Pernyataan ini kemudian dituangkan dalam visi jangka panjang daerah yang berbunyi "Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang bersih, efektif, religius, cepat, aman, harmonis, agamis, berbudaya dan sejahtera" (KUANSING BERCAHAYA) Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai potensi pertanian yang sangat besar untuk

dikembangkan. Daya dukung dan luas lahan yang besar, lebih dari setengah jumlah penduduk bekerja pada sektor pertanian dengan ketrampilan dasar yang dimiliki, pasar yang tersedia dengan infrastruktur yang sedang digalakkan, merupakan modal dasar untuk pengembangan agribisnis.

Pengembangan industri berdasarkan keunggulan kompetitif merupakan salah satu syarat terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan berdasarkan keunggulan kompetitif, daya saing produk-produk industri dalam pasaran ekspor maupun domestik akan menguat yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai tambah yang sangat bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan ekonomi berkelanjutan. Keunggulan kompetitif mensyaratkan unggul dalam mutu produk, tingkat harga yang kompetitif dan pelayanan. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang makmur secara ekonomi sehingga perlu dikembangkan pembangunan bidang perekonomian baik yang menyangkut industri, perdagangan, pertanian, dan sektor jasa lainnya yang ditopang dengan pembangunan sarana prasarana ekonomi. Masyarakat yang maju adalah juga masyarakat yang tingkat pengetahuan dan kearifan tinggi yang ditandai dengan tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi pendidikan penduduknya serta jumlah dan kualitas tenaga ahli dan tenaga profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang tinggi.

Masyarakat yang maju juga merupakan masyarakat yang derajat kesehatannya tinggi, laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial baik. Di samping itu, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, terjamin hak-haknya, terjamin keamanan dan ketenteramannya, juga merupakan masyarakat yang peran sertanya dalam pembangunan di segala bidang nyata dan efektif. Selain hal-hal tersebut, masyarakat yang maju adalah masyarakat kehidupannya didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap dan memadai. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat dan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Tingkat kemandirian masyarakat dipengaruhi pula oleh kemajuan masyarakat. Kemandirian masyarakat tercermin

antara lain pada ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan. Masyarakat sejahtera yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

Upaya mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui pembangunan di semua sektor secara sinergis dan bertahap hingga terwujud masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Pencapaian visi daerah tentu memerlukan dukungan dari semua pihak. Visi jangka panjang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memerlukan penjabaran yang lebih operasional pada tahap perencanaan selanjutnya. Dalam sistem perencanaan pembangunan yang berlaku saat ini dikenal perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan sebagai kelanjutan dari perencanaan jangka panjang. Dalam sistem ini perencanaan jangka panjang (RPJPN/D) akan dijabarkan ke dalam perencanaan jangka menengah (RPJMN/D) dengan kurun waktu lima tahunan. Selanjutnya perencanaan lima tahunan ini akan dioperasionalkan dalam perencanaan tahunan (RKP/D) yang selanjutnya akan menjadi APBN/D). Semua jenjang perencanaan tersebut seharusnya berada dalam satu koridor pada arah yang sama untuk mewujudkan visi dan prioritas yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan pembangunan yang terencana dengan baik, maka Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu menyusun rencana pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan di setiap sektor unggulan, dimana salah satu sektor unggulan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sektor pertambangan, yang menjadi tanggung jawab Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu SKPD Pemerintah Provinsi Riau, dimana keberadaan SKPD ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:

ü Perumusan kebijakan teknis dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

ü Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

ü Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

ü Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada kenyataannya, dalam membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh setiap organisasi ternyata tidak semudah yang dibayangkan, begitu pula dengan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam prakteknya, perencanaan strategis di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kuantan Singingi masih menemui banyak masalah antara lain:

1. Kurang adanya prioritas perencanaan program kerja di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kuantan Singingi, dimana selama ini program kerja didasarkan pada ketersediaan anggaran saja tanpa melihat prioritas kebutuhan yang perlu dikembangkan seperti contohnya pembangunan jaringan instalasi listrik yang setiap tahun selalu saja dilaksanakan. Meskipun pembangunan jaringan instalasi listrik juga penting, namun masih ada program yang tak kalah penting, yang dapat dijadikan prioritas di Dinas ESDM misalnya: program kemitraan pengelolaan pertambangan liar dengan masyarakat. Kondisi tambang liar di Kabupaten Kuantan Singingi cukup banyak, namun kurang dikelola dengan baik oleh Dinas ESDM, dimana selama ini Dinas ESDM hanya membuat regulasi pelarangan penambangan liar oleh masyarakat saja. Dinas ESDM perlu kirannya membuat program kemitraan yang mengacu pada prinsip saling menguntungkan, artinya masyarakat yang melakukan penggalian dan pemerintah Kabupaten Kuantan melalui Dinas ESDM menyediakan sarana serta perijinan. Hasil pertambangan dibagi dua berdasarkan kesepakatan antara Dinas ESDM dengan masyarakat.
2. Program pembangunan dalam dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) lebih

Tabel 1. Alokasi Anggaran Program Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 – 2012

Program Kerja	Tahun 2011	Tahun 2012
	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)
Fisik		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.245.668.062,54	3.432.568.555,12
Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	7.886.505.117,40	8.764.303.144,88
Jumlah	11.132.173.179,94	12.196.871.700,00
Non Fisik		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	314.287.204,02	368.360.512,00
Peningkatan Disiplin Aparatur	182.146.225,00	195.540.278,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	257.421.333,03	266.531.423,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Keuangan	153.041.578,01	181.247.654,00
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	352.334.687,00	380.148.533,00
Jumlah	1.259.231.027,06	1.391.828.400,00

Sumber: Sub Bagian Program Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi

didominasi oleh kegiatan proyek pembangunan fisik berupa pembuatan infrastruktur bangunan seperti pembangunan jaringan instalasi listrik dan peningkatan sarana dan prasarana kantor. Hal ini juga terlihat dari alokasi anggaran, dimana anggaran untuk kegiatan fisik lebih besar dan tidak sebanding kegiatan non fisik. Besarnya alokasi anggaran untuk program kerja pada kegiatan fisik dan non fisik dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa alokasi anggaran pada program kerja Dinas ESDM lebih didominasi oleh kegiatan fisik dibandingkan non fisik. Program pembangunan pada sektor pertambangan kurang menyentuh program non fisik berupa kegiatan pengembangan pegawai dan pemberdayaan pengusaha dengan cara melakukan penyuluhan dan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha tersebut dalam melakukan pengelolaan pertambangan.

3. Dalam penetapan rencana program dinas masih adanya intervensi dari pihak-pihak lain yang memaksakan pendapat. Intervensi ini berupa usulan-usulan yang disampaikan oleh anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang cenderung berdasarkan kepentingan beberapa pihak dan biasanya usulan tersebut tidak tercantum dalam usulan yang disampaikan oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan program pembangunan tidak didasarkan prioritas kebutuhan masyarakat.
4. Koordinasi dalam pelaksanaan

pembangunan belum berjalan dengan baik. Kementerian dan Dinas terkadang memiliki program sendiri-sendiri sehingga terjadi tumpang tindih program pembangunan yang mengakibatkan pembangunan tidak berjalan efektif. Contohnya: Pada Tahun 2011, baik pemerintah pusat (Kementerian ESDM) dan Dinas ESDM Kuantan Singingi, memiliki Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan yang sama berupa kegiatan pemasangan jaringan listrik di Kabupaten Kuantan Singingi. Padahal kegiatan pemasangan jaringan listrik di daerah (Kabupaten Kuantan Singingi) merupakan tanggung jawab Dinas ESDM.

Dengan melihat permasalahan di atas, jelas sekali bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki rencana kerja yang baik sehingga menyebabkan program tidak berjalan dengan efektif.

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dan mutlak harus dilaksanakan oleh pimpinan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi. Terry (Riyadi, 2004: 2), bahwa: *Planning is selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired result.* Artinya, perencanaan adalah upaya untuk memilih dan

menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Demikian juga yang dinyatakan oleh Silalahi (1992: 166) yang menyatakan bahwa Perencanaan (*Planning*) merupakan fungsi yang pertama dan bahkan yang utama dalam setiap aktivitas-aktivitas manajemen dan administrasi. Perencanaan merupakan dasar, landasan atau titik tolak dalam melaksanakan tindakan-tindakan administratif (*administrative action*). Di dalam perencanaan inilah dirumuskan dan ditetapkan seluruh aktivitas-aktivitas administrasi dan manajemen.

Dari dua pendapat di atas, maka dapat diberikan suatu pemahaman bahwa perencanaan merupakan fungsi manajemen yang esensial dan harus selalu ada dalam kegiatan manajemen dan administrasi. Perencanaan merupakan awal dari semua kegiatan manajemen dan administrasi yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan-kegiatan administratif. Kreitner (1989: 141) menjelaskan perencanaan sebagai berikut: *Planning is defined as the process of preparing for change and coping with uncertainty by formulating future courses of actions*. (Perencanaan digambarkan sebagai proses bersiap-siap menghadapi perubahan dan mengatasi ketidakpastian dengan tindakan masa depan). Lebih lanjut agar diperoleh pemahaman yang jelas tentang perencanaan, penulis mengemukakan pendapat para ahli administrasi dan manajemen, antara lain pendapat Ukas (1997: 166) yang mengemukakan: "Bila dikaitkan dengan proses kegiatannya, maka perencanaan dapat didefinisikan sebagai proses penggunaan fakta-fakta yang berhubungan dengan masa yang akan datang diikuti dengan tindakan perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu."

Pendapat di atas menunjukkan bahwa perencanaan merupakan suatu aktivitas untuk menghadapi masa yang akan datang yang mengandung unsur ketidakpastian dan resiko dalam pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan fakta-fakta yang ada maka dengan perencanaan dapat digambarkan dengan jelas kegiatan apa yang harus dilakukan menurut urutan waktu dengan cepat dan tepat sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian pendapat di atas bahwa perencanaan dimaksudkan untuk memperoleh sesuatu di masa yang akan datang, dengan mengambil

keputusan tentang apa yang dikerjakan, kapan dikerjakan dan siapa yang mengerjakan agar efektif pencapaiannya. Perencanaan merupakan proses intelektual yang diharapkan akan lebih menjamin bahwa tindakan yang diambil dapat mendekati kebenaran. Sedangkan Jone (Handayani, 1996: 126) memberikan definisi perencanaan adalah: "*Planning as the process of selecting and developing the course of action to accomplish an objective*", (Perencanaan adalah proses pemilihan dan pengembangan daripada tindakan yang paling baik/ menguntungkan untuk mencapai tujuan). Sejalan dengan pendapat tersebut, Siagian (1997: 108) memberikan definisi sebagai berikut: "Perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan."

Definisi di atas, menitikberatkan arti perencanaan sebagai pengambilan keputusan daripada tindakan terbaik yang akan dilakukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Silalahi (1992: 167) mendefinisikan bahwa: "Perencanaan (*planning*) merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur penggunaan manusia, materil, metode dan waktu untuk memaksimalkan efektifitas pencapaian tujuan." Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk mencapai suatu tujuan melalui perencanaan, perlu diperhitungkan pula sumber-sumber yang sudah dan/atau akan dimiliki. Sumber-sumber tersebut harus dapat dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang efektif. Jadi pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan oleh organisasi harus memperhitungkan juga kemampuan organisasi dalam penyediaan sumber-sumber dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Di sisi lain, dengan perencanaan akan memungkinkan kita bertindak dalam mempergunakan dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada secara efektif dan efisien melalui sistem dan prosedur serta ketentuan-ketentuan yang profesional.

Swasta (1996: 34) mengatakan bahwa ada beberapa alasan yang diberikan mengapa perencanaan itu penting yaitu:

- ▶ Perencanaan itu memberikan arah
- ▶ Menjadi standar kerja
- ▶ Memberikan suatu kerangka pemersatu
- ▶ Membantu untuk memperkirakan peluang-peluang di masa mendatang

Perencanaan memberikan arah maksudnya adalah organisasi akan memperlihatkan apa yang ingin dicapai pada waktu yang akan datang. Menjadi standar kerja adalah rencana yang ada dapat menjelaskan apa yang akan dilakukan. Sebagai kerangka pemersatu dimaksudkan dalam mengambil keputusan dalam organisasi. Kemudian perencanaan dapat meminimalisasikan resiko dan memperkirakan berapa peluang yang mungkin bisa dijangkau.

Fungsi dan unsur-unsur Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh seorang manajer, hasil dari proses perencanaan adalah suatu rencana. Untuk itu perencanaan dan rencana bagi seorang manajer dalam satu organisasi mempunyai fungsi-fungsi, seperti yang dikemukakan Kusmiadi (1995: 23-24), sebagai berikut:

- Penerjemah dari suatu kebijakan umum. Kebijakan umum dalam satu organisasi ditetapkan oleh pimpinan puncak, dan merupakan satu tujuan yang bersifat umum
- Perkiraan yang bersifat ramalan. Perencanaan selalu berhubungan dengan kegiatan yang harus dilaksanakan di masa yang akan datang. Oleh karena itu perencanaan juga berfungsi sebagai perkiraan-perkiraan masa depan
- Berfungsi ekonomi. Oleh karena kemampuan sumber daya yang dimiliki organisasi selalu terbatas, maka pangerahan sumber-sumber tersebut dalam rangka pencapaian tujuan harus direncanakan dengan baik agar seefektif mungkin
- Untuk adanya suatu kepastian kegiatan. Agar pencapaian tujuan dapat dilaksanakan dengan baik oleh organisasi, maka perlu disusun suatu rencana yang mengatur dan membagi tugas dan tanggung jawab
- Alat koordinasi. Koordinasi merupakan suatu fungsi yang sangat penting dalam kegiatan organisasi. Agar dapat melakukan koordinasi dengan baik, maka salah satu alat yang sangat penting adalah rencana
- Alat/sarana untuk pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting, dalam rangka mengukur sejauh mana pencapaian tujuan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Untuk membuat suatu rencana tertentu yang

cukup lengkap, kiranya unsur-unsur di bawah ini perlu di penuhi. Unsur-unsur perencanaan ini merupakan 6 pertanyaan yang harus dijawab. Rumusannya terkenal dengan istilah '5W + 1H', seperti yang dikemukakan Mulyadi (2005: 43-45) sebagai berikut:

- What (Apa): apa yang dilakukan sehingga perlu perencanaan.
- Why (Mengapa): apa alasannya hal itu perlu dilakukan atau perlu di prioritaskan pelaksanaannya
- Who and who : siapa (objek) dan siapa (subjek) pelaksanaannya
- Where (Di mana): mencari tempat yang strategis untuk melaksanakan kegiatan
- When (Kapan): pelaksanaannya yang tepat. Ini berarti menentukan timing yang tepat untuk pelaksanaan
- How (Bagaimana): Ini menyangkut teknis pelaksanaan kerja operasionalnya

Proses Perencanaan Selanjutnya dalam buku yang sama, membagi Proses perencanaan meliputi langkah, yaitu:

- Perkiraan.
- Penentuan tujuan.
- Penetapana sasaran-sasaran untuk mencapai tujuan, dan
- Penentuan sumber sumber-sumber yang dibutuhkan.

Pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan suatu fungsi yang sangat penting dalam kegiatan organisasi. Perencanaan yang baik juga harus memperhatikan unsur-unsur dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar menghasilkan rencana yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan yang efektif, sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tanpa adanya perencanaan mustahil kegiatan dalam satu organisasi dapat berjalan dengan baik dan terarah.

Teori dan Konsep Pembangunan

Pengertian pembangunan menurut Siagian (1996: 3) adalah "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perobahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nations building). Sehubungan dengan Definisi tersebut, selanjutnya Siagian (2000: 4-5) mengemukakan beberapa ide pokok yang harus diperhatikan dalam pembangunan, yaitu:

- ▶ Pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan
- ▶ Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental di masyarakat, tidaklah dapat digolongkan kepada kategori pembangunan
- ▶ Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan
- ▶ Pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya.
- ▶ Modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi dimensional. Artinya mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan Negara
- ▶ Bahwa kesemua hal yang telah disebutkan di muka ditujukan kepada usaha membina bangsa (*nation-building*) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Penjelasan mengenai ide-ide pokok pembangunan ini mengisyaratkan bahwa pembangunan itu harus ditafsirkan secara luas baik dari segi fisik maupun non fisik. Kemudian penulis juga mengutip pendapat yang dikemukakan Tjokroamidjojo (1995: 222) sebagai berikut: "Pembangunan merupakan suatu proses pembaruan yang berkesinambungan dan berkelanjutan dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik". Sedangkan Afiffuddin (2010: 42) berpendapat bahwa pembangunan adalah: "Perubahan dan Pertumbuhan. Secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dengan berencana memperbaiki keadaan menjadi lebih baik". Berdasarkan pendapat di atas walaupun cara penyampaianya berbeda, tetapi makna yang terkandung di dalamnya sama, yaitu bahwa pembangunan adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mengadakan pembaruan menuju suatu keadaan yang lebih baik. Kemudian penulis sampaikan pula bahwa pembangunan di desa atau kelurahan, pelaksanaannya dilakukan dengan ciri

utamanya adalah adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan baik dalam bentuk swadaya murni maupun swadaya bergotong royongnya. Dalam hal inilah diperlukan seorang pemimpin yaitu kepala desa atau kelurahan dalam menumbuhkan dan menggerakkan minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

Administrasi Negara sebagai suatu ilmu, seperti dengan ilmu-ilmu lainnya terus berkembang. Perkembangan pemikirannya bisa dilihat dalam teori atau pandangan, baik dalam model pemikiran atau peralatan analisis, arah dan perhatian serta metodologinya. Perkembangan pemikiran ilmu administrasi negara tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kedisiplinan keilmuan pada umumnya, yang lebih melihat pada fenomena yang disebut pembangunan. Kemudian perkembangan dalam studi pembangunan itu sendiri banyak terjadi pemikiran kembali, baik dalam menelaah gejala secara perspektif maupun cara pendekatan atau model penalarannya. Administrasi pembangunan berkembang sebagai salah satu kecenderungan baru dalam ilmu administrasi negara. Dilihat dari konteks perkembangan alur pemikiran dalam administrasi negara, sedangkan Administrasi Pembangunan mengkaitkan pada konteks sosial masyarakat negara-negara membangun. Tjokroamidjojo (1994: 13) menyebutkan: Administrasi Pembangunan adalah proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasi pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan lebih maju di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Menurut Tjokroamidjojo (1995: 4) pelaksanaan pembangunan diartikan: "Sebagai upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik, sesuai dengan pandangan masyarakat bangsa itu." Definisi yang dikemukakan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha dalam perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya dalam usaha pencapaian tujuan, namun sebagian masyarakat pinggiran kota besar menganggap bahwa pembangunan merupakan hal yang tidak menguntungkan karena rumah atau pemukiman mereka akan tergusur akibat dari pembangunan. Perkembangan ini dilandasi agar

transformasi sosial atau pembangunan menalar ke arah kenyataan, kecenderungan dan permasalahan mengarah kepada pemecahannya dalam suatu pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan. Kemudian Tjokroamidjojo (1995: 9-10) mengemukakan bahwa Administrasi Pembangunan mempunyai dua fungsi, yaitu antara lain:

- Penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara, meliputi bidang organisasi, kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan sarana administrasi.
- Penyempurnaan administrasi untuk mendukung: (a) perumusan kebijaksanaan dan program-program pembangunan, (b) pelaksanaannya secara efektif. (a,b) ini dinamakan proses Administrasi Pembangunan.

Definisi Administrasi Pembangunan di atas, menunjukkan bahwa bidang pengamatan administrasi pembangunan meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi umum pemerintah maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Namun pada umumnya para ahli berpendapat bahwa administrasi pembangunan lebih memusatkan diri pada masalah pengadministrasian, dengan kata lain "fungsi pemerintahan dalam pembangunan." Dengan demikian bahwa administrasi dalam hubungannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam pembangunan dapat diartikan sebagai "penyelenggaraan oleh instansi atau organisasi yang mempunyai kewenangan pelaksanaan sebagian atau keseluruhan fungsi manajemen, yaitu kegiatan perumusan (termasuk pengesahannya, pelaksanaan dan pengawasan serta memiliki hasil-hasil pelaksanaan).

Fungsi perencanaan ini merupakan fungsi yang mendasari fungsi lainnya seperti pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian atau pengawasan. Munculnya proses pengorganisasian karena adanya tujuan yang harus terakumulasi dalam perencanaan, sedangkan penggerakan kegiatan harus berpedoman pada rencana yang ada demikian juga pengawasan dan pengendalian. Tjokroamidjojo (1995: 12) mengemukakan pengertian Perencanaan Pembangunan yaitu: "Suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan, keadaan sosial ekonomi

yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif." Selanjutnya dijelaskan pula unsur-unsur pokok yang harus ada dalam penyusunan perencanaan pembangunan yaitu:

- Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan
- Adanya kerangka rencana
- Perkiraan sumber-sumber pembangunan
- Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten.
- Program investasi
- Administrasi pembangunan

Kemudian Riyadi (2004: 7) mengemukakan perencanaan pembangunan adalah:

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penetapan rencana-rencana pelaksanaan pembangunan yang lebih objektif yang memuat strategi dasar maupun dalam penyusunan rencana pembangunan, perkiraan sumber-sumber pembangunan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bondan (1992: 4) beberapa peranan perencanaan secara konseptual dan operasional yaitu:

- Perencanaan sebagai alat pengukur serta perumus dan sasaran pembangunan.
- Perencanaan sebagai alat kendali alokasi sumber daya pembangunan.
- Perencanaan sebagai sarana falsafah atas asas pembangunan tertentu.
- Perencanaan sebagai wahana legitimasi pembangunan.

Perencanaan sebagai cabang fungsi eksekutif dalam sistem ketatanegaraan memiliki rentang penjenjangan (*Supportive*) yang luas, sehingga dengan mudah meluas ke segenap cabang-cabang eksekutif lainnya. Kemudian Jhinghan (1999: 48-49) mengatakan perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu:

- Tujuan akhir yang dikehendaki, adanya kesesuaian antara perencanaan dengan

pelaksanaannya atau tepat sasaran.

- ▶ Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya, sasaran utama yang harus dialokasikan dan dilaksanakan sebagai prioritas dalam pencapaian tujuan.
- ▶ Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut, bahwa waktu merupakan ukuran suatu perencanaan bisa dikatakan efektif.
- ▶ Masalah-masalah yang dihadapi, masalah yang muncul dari implementasi perencanaan pembangunan.
- ▶ Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya, bagaimana cara memobilisasi penggunaan sumber-sumber daya yang diperlukan, seperti teknologi, SDM, dana yang sesuai dengan perencanaan.
- ▶ Kebijakan-kebijaksanaan untuk melaksanakannya, berupa kebijakan atau suatu keputusan bersama yang dihasilkan dalam perencanaan pembangunan.
- ▶ Orang, organisasi atau badan pelaksana, mereka yang mempunyai kewenangan siap melaksanakan siapa.
- ▶ Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaannya.¹

Untuk dapat melakukan perencanaan diperlukan informasi yang memadai, seperti statistik. Oleh karena itu menjadi tugas manajemen untuk mengupayakan tersedianya informasi yang dibutuhkan dan mengembangkan metodologi pengolahan informasi untuk memenuhi kebutuhan perencanaan. Sedangkan Hasibuan (2001: 113) mengemukakan langkah-langkah perencanaan pembangunan adalah:

- ▶ Menjelaskan serta merumuskan dahulu masalah/usaha/ tujuan yang akan direncanakan.
- ▶ Mengumpulkan data, informasi dan fakta yang diperlukan semestinya.
- ▶ Menganalisis dan mengklarifikasikan informasi serta hubungan-hubungannya.
- ▶ Menetapkan perencanaan, premis dan hambatan-hambatan serta hal-hal yang mendorongnya.
- ▶ Menetapkan beberapa alternatif.
- ▶ Pilihan keputusan yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada.
- ▶ Tetapkan urutan-urutan dan penetapan waktu rencana terperinci bagi rencana yang diusulkan itu.
- ▶ Laksanakanlah pengecekan tentang kemajuan rencana yang diusulkan.

Perencanaan Strategis (Renstra)

Perencanaan strategis pada dasarnya merupakan salah satu dari sekian banyak konsep perencanaan yang dikembangkan. Perencanaan merupakan suatu proses aktivitas yang berorientasi ke depan dengan memperkirakan berbagai hal agar aktivitas di masa depan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena orientasinya ke masa depan, perencanaan bersifat memperkirakan dan memprediksikan (meramalkan) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, logis, dan dapat dilaksanakan. Berkenaan dengan pengertian perencanaan strategis, dalam Modul 2 Sosialisasi AKIP yang diterbitkan oleh LAN-BPKP dinyatakan bahwa "Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis."

Menurut Saladin (2004 :23) perencanaan strategi (*strategic planning*) adalah:

Suatu perencanaan ke depan yang ditetapkan untuk dijadikan pegangan, mulai dari tingkat korporat sampai pada tingkat unit bisnis, produk, dan situasi pasar." Perencanaan strategi merupakan strategi induk dari manajemen strategi, yaitu visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan. Substansi perencanaan/rencana strategik sebagai bagian manajemen strategik, mengandung konsep dan prinsip. Dalam hal ini membicarakan hubungan antara organisasi dan lingkungannya, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Olsen dan Eadie (Riyadi, 2004 : 280), bahwa: Perencanaan strategis (Renstra) adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan membantu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya), mengerjakan hal-hal seperti itu. Dari pengertian itu, paling tidak ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, keputusan strategis juga keputusan mendasar (fundamental). Kedua, keputusan strategis merupakan keputusan yang spesifik yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas. Ketiga, ada batasan lingkup dari perencanaan strategis dalam politik dan konstitusi yang berbeda

dengan sektor swasta.

Tahapan-tahapan dalam proses perencanaan strategis menurut Osborne dan Gaebler (Riyadi, 2004:282), yang dapat pula dikatakan sebagai komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam upaya menyusun Renstra, meliputi:

- Analisis Situasi, baik internal maupun eksternal (*analysis of the situation, both internal and external*)
- Diagnosis, atau identifikasi isu-isu kunci (*diagnosis, or identification of the key isu facing the organization*)
- Menciptakan sebuah visi : keberhasilan seperti apa yang diinginkan (*creation of vision: what success looks like*)
- Mendefinisikan misi organisasi (*definition of the organizations fundamental mission*)
- Mengartikulasikan tujuan dasar organisasi (*articulation of the organizations basic goals*)
- Mengembangkan suatu strategi untuk merealisasikan visi dan tujuan-tujuan (*development of a strategy to realize the vision and goals*)
- Mengembangkan jadwal untuk melaksanakan strategi (*development of a timetable for that strategy*)
- Mengukur dan mengevaluasi hasil (*measurement and evaluation of result*)

Selanjutnya menurut Shapek (2000) sepuluh komponen perencanaan strategis yang dapat dituangkan sebagai berikut:

- *Organizational history, culture, and structure: persons, places, structure organization* (sejarah organisasi, budaya, dan struktur)
- *Formal and informal mandates* (tugas pokok dan fungsi organisasi); *law, rule, regulations, policies*
- *Stakeholders and clientele groups* (kelompok-kelompok berkepentingan); *Individual or organizations*.
- *Service area and services* (area pelayanan dan jenis pelayanannya).
- *Organizational vision* (visi organisasi).
- *Organizational mission* (misi organisasi).
- *Trends and event* (isu-isu actual).
- *Strengths, weaknesses, opportunities, and challenges* (kekuatan, kelemahan, kesempatan/ peluang, dan tantangan).
- *Goals, objectives, and strategies* (tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan strategis).
- *Implementatation and evaluation* (pelaksanaan dan evaluasi).

Perencanaan strategis dalam sektor publik

atau yang dalam istilah Graham S. Toft (2000) disebut dengan perencanaan strategis formal (*formal strategic planning*) lebih mengarah pada suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara bertahap dan terstruktur dengan menggunakan metode yang rasional sebagai upaya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu organisasi publik. Komponen dalam pengambilan keputusan meliputi:

- Pendefinisian masalah dan pemeriksaan strategis;
- Perumusan pernyataan misi dan tujuan;
- Memformulasikan strategi (alternative);
- Mengevaluasi dan menyeleksi strategi;
- Implementasi (pelaksanaan);
- Pengukuran hasil, dan
- Pengawasan.

Bryson, (2007:3) mengemukakan bahwa untuk menghadapi lingkungan yang cepat berubah maka organisasi harus : Pertama, berpikir strategis, yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Kedua, menerjemahkan inputnya untuk strategi yang efektif guna menanggulangi lingkungan yang telah berubah. Ketiga, mengembangkan alasan yang diperlukan untuk meletakkan landasan bagi pemakaian dan pelaksanaan strateginya. Proses manajemen strategis (perencanaan strategis) sebagaimana dikemukakan oleh Bryson (2007:55), terdiri dari 8 (delapan) langkah, yaitu:

- Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis.
- Mengidentifikasi mandat organisasi.
- Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi.
- Menilai lingkungan eksternal : peluang dan ancaman.
- Menilai lingkungan internal: kekuatan dan kelemahan.
- Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi.
- Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu.
- Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan

Disamping tahapan-tahapan perencanaan strategis, kita dapat merumuskan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai prinsip-prinsip umum perencanaan strategis, yaitu :

- Perencanaan strategis harus bersifat antisipatif terhadap berbagai permasalahan yang ada di masa depan dengan mempertimbangkan kondisi masa sekarang

- untuk mengatasinya (orientasi masa depan).
- ▶ Perencanaan strategis harus berorientasi pada pencapaian hasil (result oriented) dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi sebagai rel yang harus dijalankan secara konsisten.
 - ▶ Perencanaan strategis harus menggambarkan apa yang akan ingin dicapai di masa depan oleh suatu organisasi kearah peningkatan produktivitas dan kinerja (vision reflection).
 - ▶ Perencanaan strategis harus memperhitungkan kemampuan internal dan kondisi eksternal.
 - ▶ Harus ada komitmen dan konsensus untuk melaksanakannya secara konsisten sebagai hasil proses pengambilan keputusan bersama.
 - ▶ Harus mencerminkan prioritas tindakan dalam upaya pencapaian hasil secara optimal.
 - ▶ Perencanaan strategis dalam prosesnya harus mempertimbangkan input-input dari stakeholder atau klien group.
 - ▶ Harus memperhitungkan aspek keuangan untuk melaksanakannya.
 - ▶ Harus dapat diukur hasilnya.

C. METODE PENELITIAN

Dalam menganalisa data penulis menggunakan perpaduan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif, didasarkan pertimbangan bahwa dalam pembahasan penelitian bersifat naratif, menjelaskan hasil wawancara dan observasi mengenai perencanaan strategis. Sedangkan kuantitatif, didasarkan pada adanya angka pembobotan dalam analisis SWOT untuk menilai faktor internal dan eksternal oleh Kepala Bappeda dan Kepala Dinas ESDM sehingga didapatkan strategi-strategi penentuan program kerja Dinas ESDM. Dengan demikian, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan ada dua jenis yaitu:

- ▶ Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari aparat terkait, masyarakat, atau informan lapangan yang dilakukan melalui wawancara.
- ▶ Data sekunder, data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan-bahan kepustakaan baik

berupa arsip, laporan maupun dokumen yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian akan dipergunakan teknik pengumpulan data yaitu: Wawancara, Observasi atau Pengamatan, Studi Kepustakaan atau Dokumentasi

Prosedur Pengolahan Data ddalam tahapan kegiatan pengolahan data penulis lakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- ▶ Mengklasifikasi Materi Data yang terdiri dari: *C a t a t a n l a p a n g a n* (hasil wawancara/observasi)., Gambar lokasi penelitian, Data sekunder, Foto (apabila diperlukan).
- ▶ Mengklasifikasi berdasarkan satuan-satuan gejala yang diteliti (mengelompokkan sesuai pertanyaan-pertanyaan peneliti/sub variabel).
- ▶ Mengolah data berdasarkan keterkaitan antar komponen, satuan gejala dalam konteks fokus permasalahan.
- ▶ Mendeskripsikan secara keseluruhan dan sitematik keterkaitan antar satuan gejala tersebut.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan mempergunakan metode analisis kualitatif, dengan menggunakan analisis SWOT. Setelah dilakukan analisis SWOT maka dapat mengetahui kondisi nyata apa yang terjadi di lingkungan internal dan external organisasi, sehingga dapat mulai membuat rencana program kerja yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan dan mampu untuk dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat sepertipada Tabel 2.

- ▶ Strategi SO, dipakai untuk menarik keuntungan dari peluang yang tersedia dalam lingkungan internal, disebut *Agressive*
- ▶ Strategi WO, bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan luar, disebut *Turn Around*
- ▶ Strategi ST, akan digunakan organisasi untuk menghindari, paling tidak memperkecil dampak dari ancaman yang datang dari luar, disebut *Diversification*
- ▶ Strategi WT, adalah taktik pertahanan yang diarahkan pada usaha memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal, disebut *Defensive*

Tabel 2. Matrik Analisis SWOT

IFAS	STRENGTH (S) Tentukan faktor - faktor kekuatan internal	WEAKNESS (W) Tentukan faktor - faktor kelemahan internal
EFAS	STRATEGI S-O ► Ciptakan Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI W-O Ciptakan Strategi untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
THREATS (T) Tentukan faktor - faktor ancaman eksternal	STRATEGI S-T Ciptakan Strategi dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI W-T Ciptakan Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman yang diciptakan

Validitas dan akurasi data dan informasi perlu dijamin, maka akan dilakukan Triangulasi (*Check, re-check, dan cross check*). Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *re-check* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, penyidik dan teori. Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
- Mengeceknnya dengan berbagai sumber data.
- Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

D. ANALISIS

Dalam analisis ini dalam pelaksanaannya dilakukan sebagaimana dikemukakan oleh Bryson (2007:55), terdiri dari 8 (delapan) langkah, yaitu:

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis

Tujuan langkah pertama dalam perencanaan strategis adalah menegosiasikan kesepakatan dengan orang-orang penting pembuat keputusan atau pembentuk opini internal tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah perencanaan yang penting. Dalam hal ini Kepala Dinas ESDM dan legislatif (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi. Kepala Dinas ESDM sebagai pimpinan organisasi di Dinas ESDM tentu harus memiliki program kerja sesuai dengan visi misi bupati. Sebagai pelaksana sebagian kewenangan bupati, Kepala

Dinas ESDM harus memiliki perencanaan kerja yang baik yang tentunya harus didukung oleh elemen organisasi yang ada di Dinas ESDM. Dukungan dan komitmen merupakan hal yang penting jika perencanaan strategis ingin berhasil. Jelaslah bahwa peran DPRD sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kerja di Dinas ESDM. Komitmen dan dukungan DPRD adalah dengan memberikan anggaran yang memadai agar setiap program kerja yang ada di Dinas ESDM berjalan dengan lancar. Selama ini dukungan DPRD cukup baik dalam pengembangan bidang ESDM, dimana anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya cenderung meningkat. Seperti yang sudah diungkapkan di bab sebelumnya (Bab I), dimana anggaran untuk pembangunan fisik pada tahun 2011 sebesar Rp. 11.132.173.179,94 dan meningkat pada tahun 2012 sebesar Rp. 12.196.871.700,00. Sedangkan untuk pembangunan non fisik, alokasi anggaran pada tahun 2011 adalah Rp. 1.259.231.027,06 dan meningkat pada tahun 2012 sebesar Rp.1.391.828.400,00.

2. Memperjelas Mandat Organisasi

Mandat formal dan informal yang ditempatkan pada organisasi adalah "keharusan" yang dihadapi organisasi. Mandat formal yang diberikan kepada Dinas ESDM sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 31 Tahun 2009, Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi. Artinya bahwa Dinas ESDM memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan untuk mengelola dan mengembangkan bidang ESDM di Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan mandat secara informal bahwa Dinas ESDM diberikan sebagian

kewenangan oleh bupati untuk melaksanakan pembangunan di bidang ESDM. Dinas ESDM melaksanakan visi misi bupati dalam RPJMD yang dituangkan dalam renstra dan renja Dinas ESDM. Untuk itu, maka koordinasi langsung Dinas ESDM adalah dengan Bupati Kuantan Singingi. Selain dengan bupati koordinasi tidak langsung Dinas juga dilakukan dengan Bappeda dan legislatif. Koordinasi dilakukan sesuai dengan kepentingannya, misalnya koordinasi Dinas ESDM dengan DPRD terkait anggaran pembangunan Dinas ESDM dan dengan Bappeda terkait dengan perencanaan pembangunan bidang ESDM.

3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi

Dalam perencanaan strategis, Dinas ESDM perlu menyelaraskan visi misinya dengan visi misi Bupati. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dimana visi Dinas ESDM "Terwujudnya Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang maju, berkelanjutan, berpihak kepada Kepentingan rakyat, memenuhi kaidah hukum dan berwawasan lingkungan". Visi ini dinilai cukup mendukung visi dari Kabupaten Kuantan Singingi yaitu: "Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Bersih, efektif, Religius, Cepat, Aman, Harmonis, Agamis, Berbudaya dan Sejahtera (KUANSING BERCAHAYA)". Dalam Visi Kabupaten Kuantan Singingi dikatakan bahwa semua pembangunan berpihak pada kepentingan rakyat yaitu memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Visi Dinas ESDM pun tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, arah tujuan pembangunan Dinas ESDM harus mengacu kepada misinya, dimana selain pembangunan fisik, Dinas ESDM juga melaksanakan pembangunan di bidang non fisik seperti dituliskan dalam salah satu misinya yaitu: "Memperkuat serta meningkatkan manajemen dinas dan menciptakan personil yang berkemampuan dalam mewujudkan kelembagaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dapat dipercaya, tangguh, handal dan produktif". Namun kenyataannya di lapangan bahwa pembangunan lebih didominasi oleh pembangunan fisiknya dibanding pembangunan non fisik.

4. Analisis Lingkungan Internal

a. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia (SDM) aparatur yang ada di Dinas Energi Dan Sumber Daya

Mineral Kabupaten Kuantan Singingi masih sangat kurang memadai apabila dilihat dari sisi kualitas maupun kuantitas, dari sisi kualitas masih banyak pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan masih rendah, hal ini sesuai hasil dokumentasi, dimana pegawai yang berlatar belakang pendidikan sarjana S-1 rata-rata 31,71% atausebanyak 13 orang dari jumlah pegawainya yang ada berjumlah 41 orang.

Dari jumlah keseluruhan pegawai di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi hanya 5 orang pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan khusus di bidang perencanaan, sebagaimana dikatakan oleh Kepala Dinas ESDM bahwa: "Secara keseluruhan kualitas pegawai belum memadai, tingkat pendidikan formal maupun pendidikan penjenjangan masih dikatakan sangat belum memadai. Hanya beberapa pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan di Bidang Perencanaan ini disertai kewenangan untuk mengurus perencanaan program kerja. Untuk itu kami sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas pegawai dengan mengikuti Diklat-diklat teknis maupun fungsional dan pendidikan formal berupa S-1, maupun S-2". Kurangnya pendidikan fungsional di lingkungan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi yang berhubungan dengan perencanaan program akan berdampak pada sikap yang kurang profesional dalam menjalankan tugas, ini terlihat adanya keluhan dari pelanggan perihal masih buruknya pelayanan yang diberikan pegawai, serta kurang adanya kreatifitas dari pegawai dalam menjalankan tugasnya. Kondisi tersebut akan menjadi kelemahan bagi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi karena Dinas ESDM sebagai ujung tombak untuk melaksanakan pembangunan di bidang energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Sumber Dana/Anggaran.

Pendanaan sebagai wujud keberadaan sumber daya anggaran dalam operasional tugas-tugas rutin maupun pembangunan yang harus diemban suatu organisasi merupakan suatu hal yang sangat vital. Ketersediaan anggaran dan kemampuan mengelola serta memanfaatkannya secara optimal sangat mempengaruhi produktivitas

dan bahkan bermuara pada keberhasilan kinerja organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut balai juga memiliki kewenangan dalam merencanakan kebutuhan pendanaan organisasinya.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2012 di dukung dengan sejumlah dana Rp. 16.740.896.679,00,- (Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri dari:

- Belanja Tidak Langsung yang diperuntukkan gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp. 2.515.859.579,00,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- Belanja Langsung yang dipergunakan untuk belanja aparatur dan belanja pembangunan yang berjumlah Rp. 14.225.040.100,00,- (Empat Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu Seratus Rupiah).

Dengan demikian, maka dana yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka pembangunan energi dan sumber daya mineral dirasakan cukup memadai, dimana anggaran yang digunakan (direalisasikan) tidak melebihi dari anggaran yang ditetapkan. Selain itu juga adanya komitmen dari legislatif (DPRD) untuk selalu menaikan anggaran setiap tahunnya. Hal ini berarti pemerintah daerah sudah mulai memahami betapa pentingnya upaya pembangunan energi dan sumber daya mineral dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam era otonomi daerah dewasa ini peran lembaga legislatif sangat menentukan sekali dalam hal penentuan anggaran, komitmen dari pada anggota dewan dalam upaya pengembangan energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Kuantan Singingi tergambar dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas yang mengatakan bahwa: "Pada prinsipnya dewan sangat merespon usulan-usulan yang menyangkut dengan pengembangan energi dan sumber daya mineral, bahkan dewan selalu menaikan

porsi sektor migas tersebut dan dewan tidak pernah menolak usulan program dalam rangka pengembangan energi dan sumber daya mineral hanya saja dalam penerapan dilapangan tergantung kinerja dari eksekutif".

c. Kelembagaan/Struktur Organisasi.

Perencanaan pembangunan energi dan sumber daya mineral diperlukan kelembagaan yang legal. Seperti halnya Dinas ESDM memiliki legalitas hukum yang kuat dalam menjalankan fungsinya, dimana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 31 tahun 2009, Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi. Kekuatan dari perbup ini sangat berpengaruh terhadap tujuan yang hendak dicapai yaitu mengenai perencanaan pembangunan di Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan adanya perbup tersebut maka kegiatan perencanaan pembangunan ESDM menjadi legal secara hukum sehingga perencanaan pembangunan tidak akan mengalami hambatan.gangguan dari pihak manapun.

Dengan struktur organisasi yang terpenuhi sesuai kebutuhan, maka alur pekerjaan dan pembagian tugas akan berjalan dengan baik. Struktur organisasi yang ada pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

- Kepala Dinas.
- Sekretariat membawahi: Sub Bagian Program; Sub Bagian Umum; Sub Bagian Keuangan.
- Bidang Geologi dan Pertambangan Umum membawahi: Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral; Seksi Pengusahaan dan Perizinan; Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
- Bidang Migas, Ketenagalistrikan dan Energi membawahi: Seksi Migas; Seksi Ketenagalistrikan; Seksi Pengembangan dan Konservasi Energi.
- Bidang Perencanaan dan Peralatan Teknis, membawahi: Seksi Perencanaan Teknis; Seksi Operasional Peralatan; Seksi Pengolahan Data, Dokumentasi dan Promosi.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit kerja yang ada pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi semuanya telah terisi dan hal ini menjadi kekuatan organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Disamping itu didukung oleh staf yang cukup untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan masing-masing.

d. Sarana dan Prasarana

Agar dapat melaksanakan tugas-tugas seoptimal mungkin, maka diperlukan sejumlah sarana dan prasarana yang memadai dan tentu saja sarana dan prasarana tersebut harus dapat mendukung dalam kegiatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi, secara kualitas maupun kuantitas belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, terutama dalam mendukung upaya pengembangan ESDM. Kurangnya sarana kerja seperti terlihat dalam setiap kegiatan proyek pembangunan ESDM selalu melakukan merger dengan pihak lain (Instansi lain/swasta). Hal ini membuktikan bahwa Dinas ESDM belum memiliki sarana kerja yang memadai.

e. Penyediaan Data/Informasi

Data dan informasi didapatkan dari strategi yang dibuat oleh Dinas ESDM. Dari hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa belum adanya formulasi strategi yang jelas dalam pengembangan ESDM. Untuk melaksanakan sebuah kegiatan membutuhkan perencanaan yang matang terlebih dahulu kemudian dituangkan dalam bentuk usulan program kegiatan yang mengacu pada program kerja yang ada. Program-program tersebut merupakan acuan yang dibuat dalam konsep perencanaan jangka pendek menengah dan jangka panjang. Formulasi rencana kerja dalam mengembangkan ESDM yang dimiliki Dinas berlum jelas yang berakibat pada tidak adanya arah yang jelas bagi pengembangan ESDM di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas ESDM didapatkan informasi bahwa: "Secara umum strategi Dinas ESDM dalam menentukan program kerjanya cukup baik. Hanya saja, program tersebut belum tersusun dengan baik dan belum mengedepankan skala prioritas program yang akan dilaksanakan. Program

kerja hanya secara global saja sehingga dalam pelaksanaannya semua program tersebut dituntut untuk dilaksanakan. Padahal kenyataannya program tersebut masih belum dilaksanakan secara menyeluruh".

5. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Politik.

Faktor politik dalam lingkungan eksternal yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah yaitu, menyangkut dengan berbagai kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi yang memiliki keterkaitan dengan sektor migas yang memberikan dampak terhadap pengembangan ESDM, berupa Peraturan Daerah, Perundang-Undangan, komitmen-komitmen politik.

Keberhasilan ataupun kegagalan pembangunan bidang ESDM tidak akan terlepas dari komitmen DPRD yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tercapainya pembangunan bidang ESDM. Dari hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa dalam penetapan rencana program dinas masih adanya intervensi dari pihak-pihak lain yang memaksakan pendapat. Intervensi ini berupa usulan-usulan yang disampaikan oleh anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang cenderung berdasarkan kepentingan beberapa pihak dan biasanya usulan tersebut tidak tercantum dalam usulan yang disampaikan oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan program pembangunan tidak didasarkan prioritas kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi didapatkan informasi bahwa: "Memang dalam setiap perencanaan pembangunan di setiap dinas/instansi baik pusat maupun daerah ada hubungannya dengan DPRD, terutama terkait dengan persetujuan anggaran kegiatan. Selain itu, dalam perencanaan pun DPRD seringkali melakukan intervensi dalam hal usulan program yang akan dilaksanakan, dimana usulan yang diberikan anggota legislatif tersebut terkadang tidak didasarkan pada prioritas kebutuhan program dinas".

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dalam lingkungan eksternal dimaksudkan adalah berbagai

kecenderungan dinamika perekonomian di luar sektor pertambangan yang memberikan dampak langsung ataupun tidak langsung terhadap perencanaan pembangunan yang tercermin antara lain melalui fluktuasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengaruh krisis ekonomi dan moneter terhadap penganggaran kegiatan pembangunan Dinas ESDM. Kinerja perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2012 tergambarkan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sampai dengan triwulan III tahun 2012, mengalami pertumbuhan sebesar 8,66 persen dari triwulan sebelumnya, yang tumbuh sebesar 8,54 persen. Meningkatnya perekonomian Riau ini ternyata membawa dampak yang positif terhadap perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi, meskipun peningkatan perekonomian tersebut masih relatif kecil. Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2012 mampu tumbuh sebesar 8,77 persen, walaupun ada penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 8,81 persen. Dengan berkembangnya beberapa sektor tersebut, maka telah terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun-tahun sebelumnya.

Besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Kuantan Singingi dapat diketahui bahwa peranan terbesar dalam penciptaan nilai tambah yang diberikan oleh sektor pertanian meskipun besarnya senantiasa berfluktuasi, yakni sebesar 59,99 pada tahun 2012, walaupun sedikit mengalami penurunan sebesar 1,55 persen dari tahun 2011. Untuk mempertahankan nilai pendapatan, pemerintah daerah kabupaten berupaya membuat kebijakan yang memberikan perhatian kepada sektor-sektor yang memberikan kontribusi kepada peningkatan perekonomian daerah.

Kontribusi kedua terbanyak adalah dari sektor industri pengolahan, dengan arah peranan yang terus meningkat dari 16,77 persen menjadi 15,47 persen pada tahun 2012, yang mengalami penurunan sebesar 1,3 persen. Begitu juga sektor pertambangan dan penggalian yang menduduki peringkat ketiga menunjukkan tingkat pertumbuhan yang bervariasi dan selalu meningkat dari

tahun ke tahun yaitu dari 2,06 persen pada tahun 2002 dan tahun 2012 meningkat menjadi 9,22 persen. Selanjutnya sektor lain terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Kuantan Singingi, hanya berkisar 0,15 - 4,95 persen dengan titik terendah terjadi pada sektor listrik dan tertinggi sektor perdagangan.

Berdasarkan data PDB membuktikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 2010-2012 stabil dan kondusif. Laju pertumbuhan Indonesia berdasarkan angka PDB selama tahun 2010 sebesar 5,99 persen, tahun 2011 sebesar 6,57 persen dan terakhir tahun 2012 tercatat sebesar 6,09 persen. Dalam kurun waktu yang sama, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi juga berjalan mantap dan selalu lebih tinggi dari pertumbuhan Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi didapatkan informasi bahwa: "Secara umum perekonomian daerah Kabupaten Kuantan Singingi dinilai cukup baik, dimana PDRB kabupaten setiap tahunnya meningkat. Hal ini tentu sangat berdampak kepadapembiayaan daerah atas program kerja di setiap SKPD. Meskipun memang kenyataannya, masih ada beberapa SKPD yang diberikan anggaran yang kurang memadai."

c. Faktor Sosial.

Faktor sosial yang mempengaruhi lingkungan eksternal yaitu, berbagai gambaran keadaan sosial budaya masyarakat berupa nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, sikap, pola hidup, kebudayaan, jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan yang memberikan dampak langsung ataupun tidak langsung terhadap pengembangan ESDM sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan nilai PAD dari bidang ESDM. Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2012 mencapai 270.160 jiwa dan naik sedangkan tahun 2011 tercatat sekitar 267.408 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan dari tahun 2010 (SP 2000) sebesar 1,89%. Jumlah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya sejumlah 2.752 jiwa. Ditinjau dari jumlah komposisi penduduk, ternyata dari

penduduk perempuan masih lebih banyak penduduk laki-laki. Penduduk laki-laki pada tahun 2012 berjumlah 135.965 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 134.195 jiwa. Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya ialah Kecamatan Kuantan Tengah, yakni sekitar 43.676 jiwa, kemudian diikuti oleh Kecamatan Benai sejumlah 31.539 jiwa, sedangkan Kecamatan Hulu Kuantan adalah kecamatan yang penduduknya paling sedikit diantara kecamatan yang lain yaitu berjumlah 7.568 jiwa.

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk yang banyak mengisyaratkan bahwa banyaknya elemen masyarakat yang bisa diajak berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan khususnya di bidang ESDM.

d. Faktor Teknologi.

Faktor teknologi yang mempengaruhi lingkungan eksternal organisasi yaitu, perkembangan teknologi yang terkait dengan teknologi di bidang ESDM yang memberikan dampak langsung atau tidak langsung terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kuantan Singingi seperti teknologi pemetaan wilayah untuk mencari keberadaan wilayah pertambangan, teknologi konversi BBM ke BBG. Peningkatan teknologi mendorong upaya untuk meningkatkan kualitas mutu pembangunan dan pengolahan ESDM sehingga dapat meningkatkan PAD daerah. Teknologi dapat membantu pengembangan dalam pengolahan sumber daya mineral sehingga lebih berguna dan bermanfaat baik masyarakat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kabid Energi Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi didapatkan informasi bahwa: "Memang salah satu permasalahan dalam pengembangan ESDM adalah masih belum optimalnya penggunaan teknologi. Selama ini penggunaan teknologi dalam pengelolaan ESDM masih minim dikarenakan kurangnya kualitas SDM yang dimiliki serta kurangnya anggaran dalam pemenuhan teknologi tersebut." Hasil analisis lingkungan internal dan eksternal Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada Tabel 3.

6. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

a. Hasil Evaluasi Faktor-Faktor Strategis Internal

Dari identifikasi dan penentuan faktor-faktor strategis internal, dihasilkan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam perencanaan strategis di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Faktor-faktor tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan matriks IFAS (Internal Strategic Faktor Analysis Summary) untuk memperoleh bobot, peringkat dan nilai yang dibobot. Bobot diberikan menentukan kepentingan relatif dari faktor-faktor internal untuk pembangunan ESDM, sedangkan peringkat yang diberikan berdasarkan kondisi Kabupaten Kuantan Singingi dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Total nilai yang dibobot untuk mengetahui secara keseluruhan kondisi dinas dalam perencanaan strategis dalam pembangunan bidang ESDM. Hasil analisis matriks diperlihatkan bahwa total nilai yang dibobot faktor internal adalah 2,38. Hal ini menunjukkan bahwa secara internal perencanaan strategi Dinas ESDM dinilai lemah, karena total nilai yang dibobot berada di bawah rata-rata 2,5.

1) Kekuatan

Faktor internal sebagai kekuatan utama yang mempunyai kepentingan relatif tertinggi untuk strategi perencanaan pembangunan adalah dukungan Bupati untuk memberikan keuasaan dalam penanganan pengelolaan ESDM kepada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi dengan bobot 0,1 dan rating sebesar 4 yang berarti faktor tersebut merupakan kekuatan pertama dengan kepentingan relatifnya tinggi bagi pengembangan sumber daya mineral, dengan nilai yang dibobot sebesar 0,4. Peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan dan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dinilai cukup penting, karena akan memudahkan akses dan koordinasi Dinas ESDM dengan instansi lain terkait dengan pengembangan dan pembangunan bidang ESDM. Selanjutnya kekuatan yang sangat mendukung pengembangan dan pembangunan bidang ESDM adalah komitmen peningkatan anggaran pembangunan bidang ESDM dengan bobot 0,11 dan rating sebesar 3, sehingga diperoleh nilai yang dibobot sebesar 0,33. Anggaran

Tabel 3. Hasil Matriks SWOT Penentuan Alternatif Strategi Perencanaan strategis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi

FAKTOR STRATEGI INTERNAL	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> ► Adanya legalitas hukum pembentukan Dinas ESDM ► Dukungan Bupati dengan menyerahkan urusan pengembangan ESDM kepada Dinas ESDM ► Adanya komitmen dari DPRD untuk meningkatkan anggaran pembangunan ESDM ► Adanya potensi SDA yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> ► Kualitas SDM yang rendah ► Belum ada kebijakan dukungan sarana dan prasarana pengelolaan ESDM. ► Belum ada kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber daya mineral. ► Belum ada formulasi strategi pengembangan ESDM yang jelas
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
<ul style="list-style-type: none"> ► Bidang ESDM menjadi salah satu penopang ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi. ► Peningkatan permintaan hasil migas (ekspor) ► Peningkatan minat pengusaha untuk merger dengan pemerintah terkait ESDM ► Jumlah penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan yang meningkat setiap tahun ► Perkembangan teknologi ESDM yang semakin maju. 	<p>Strategi memanfaatkan kekuatan untuk mengisi peluang.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan potensi ESDM ► Peningkatan Pembangunan sarana infrastruktur ESDM ► Peningkatan kemitraan dalam pengelolaan ESDM 	<p>Strategi meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Meningkatkan kualitas SDM ► Peningkatan teknologi sarana pengelolaan ESDM ► Peningkatan mutu produk ► Penyusunan pedoman rancangan pengembangan ESDM
THREATS (T)	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
<ul style="list-style-type: none"> ► Penggalan liar ► Banyaknya kompetitor dari swasta dan luar negeri ► Lemahnya penguasaan pasar ► Krisis ekonomi 	<p>Strategi memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Regulasi mengenai penguatan pasar usaha mikro dan menengah ► Meningkatkan fungsi pengawasan dalam pengelolaan ESDM ► Menetapkan peraturan perijinan penggalian bahan tambang 	<p>Strategi meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pengembangan SDM ► Peningkatan eksplorasi SDA.

yang cukup memadai tentunya dapat memudahkan pemerintah daerah (Dinas ESDM) untuk mengembangkan bidang ESDM. Karena kalau anggaran tersendat (minim), maka banyak kegiatan pengembangan yang terhambat.

Faktor internal lainnya sebagai kekuatan yang mempunyai kepentingan relatif tinggi untuk pembangunan bidang ESDM di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Adanya legalitas hukum pembentukan Dinas ESDM termasuk struktur organisasi, tupoksi dan kejelasan prosedur dengan nilai bobot sebesar 0,09 dan rating sebesar 3, sehingga diperoleh nilai bobot sebesar 0,27. Struktur organisasi sangat diperlukan sebagai bentuk legitimasi bagi instansi Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya pengembangan dan pembangunan Bidang ESDM. Selain itu, dengan adanya kejelasan struktur organisasi, maka juga adanya kejelasan tupoksi pegawai dalam menjalankan tugasnya. Faktor internal berikutnya adalah ketersediaan potensi

sumber daya yang memadai dengan bobot sebesar 0,08 dan rating sebesar 3 sehingga skor bobotnya sebesar 0,24. Ketersediaan potensi sumber daya mineral yang cukup besar, yang terdiri dari potensi gas alam, mineral dan pertambangan sehingga hal ini menjadi kekuatan dalam pengembangan dan pembangunan bidang ESDM di Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi.

2) Kelemahan

Faktor internal sebagai kelemahan utama adalah masih banyak potensi bahan tambang dan mineral yang belum digali dengan bobot sebesar 0,25 dan rating 2, sehingga skor bobotnya sebesar 0,5. Masih banyaknya potensi bahan tambang dan mineral yang belum dioptimalkan dan digali secara intensif sehingga menghambat optimalisasi pendapatan daerah. Selain itu, masih banyak daerah di Kuantan Singingi yang memiliki potensi bahan tambang tapi belum dikelola oleh pemerintah daerah (Dinas ESDM). Faktor kualitas SDM/perencana

pembangunan masih rendah dengan bobot sebesar 0,16 dan diberi rating sebesar 2, yang berarti faktor tersebut merupakan kelemahan yang cukup besar tetapi memiliki kepentingan lumayan tinggi untuk pengembangan bidang ESDM, dengan nilai yang dibobot diperoleh sebesar 0,32. Dengan kemampuan perencana pembangunan dalam menentukan program pembangunan di bidang ESDM yang rendah tentu akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di bidang ESDM.

Faktor kelemahan berikutnya yang memiliki peran yang sangat penting bagi pengembangan dan pembangunan bidang ESDM di Kuantan Singingi adalah belum ada formulasi strategi pengembangan dan pembangunan bidang ESDM yang jelas. Faktor kelemahan tersebut memiliki skor bobot sebesar 0,22. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan bidang ESDM tidak akan berjalan dengan baik, apabila starteginya tidak diformulasikan secara terukur dan terencana. Faktor kelemahan lainnya yaitu sarana dan prasarana pengembangan SDM yang belum memadai, dengan skor bobot 0,1. Kurangnya sarana kerja seperti terlihat dalam setiap kegiatan proyek pembangunan ESDM selalu melakukan merger dengan pihak lain (Instansi lain/swasta). Hal ini membuktikan bahwa Dinas ESDM belum memiliki sarana kerja yang memadai.

b. Hasil Evaluasi Faktor-Faktor Strategis Eksternal

Dari identifikasi dan penentuan faktor-faktor strategis eksternal, dihasilkan faktor-faktor peluang dan ancaman yang dimiliki Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi dalam pembangunan di bidang ESDM Kabupaten Kuantan Singingi. Faktor-faktor tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan matriks EFAS (External Strategic Faktor Analysis Summary) untuk memperoleh bobot, peringkat dan nilai yang dibobot. Bobot diberikan menentukan kepentingan relatif dari faktor-faktor eksternal untuk pembangunan bidang ESDM, sedangkan peringkat yang diberikan berdasarkan kondisi Dinas ESDM. Total nilai yang dibobot untuk mengetahui secara keseluruhan kondisi dinas dalam pembangunan di bidang ESDM. Hasil analisis matriks EFAS diperlihatkan bahwa total nilai yang dibobot faktor eksternal adalah 2,85. Hal ini menunjukkan

bahwa secara eksternal perencanaan strategis dinilai kuat, karena total nilai yang dibobot berada di atas rata-rata 2,5.

1) Peluang

Faktor eksternal sebagai peluang utama yang mempunyai kepentingan relatif tertinggi untuk perencanaan pembangunan bidang ESDM adalah bidang ESDM menjadi salah satu penopang ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi dengan bobot 0,18 dan rating sebesar 3 yang berarti faktor tersebut merupakan peluang utama dengan kepentingan relatif tinggi bagi pengembangan dan pembangunan bidang ESDM, dengan nilai yang dibobot sebesar 0,54. Peluang ini sangat berpengaruh terhadap tujuan yang hendak dicapai yaitu mengenai keberhasilan pembangunan di bidang ESDM. Dengan bidang ESDM menjadi salah satu penopang ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi tentunya akan mempengaruhi perkembangan produksi hasil tambang yang terus meningkat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

Faktor lainnya yaitu peningkatan permintaan hasil pertambangan (ekspor) dengan nilai bobot sebesar 0,16 dan rating sebesar 3, sehingga diperoleh nilai bobot sebesar 0,48. Pencapaian volume dan nilai ekspor setiap tahunnya meningkat seperti tahun 2011 tercapai nilai ekspor US\$ 55.567.778,45. Jika dibandingkan dengan tahun 2010, nilai ekspor naik 132,86%. Selanjutnya peluang yang sangat mendukung perencanaan pembangunan di bidang ESDM adalah peningkatan minat pengusaha untuk menjadi pengusaha pertambangan atau untuk merger dengan pemerintah terkait ESDM dengan bobot 0,15 dan rating sebesar 3, sehingga diperoleh nilai yang dibobot sebesar 0,45. Kondisi ini tentu akan menguntungkan Dinas ESDM dalam pengelolaan bidang ESDM, karena akan terbantu dari segi anggaran dan peralatan yang dibutuhkan dalam pembangunan bidang ESDM. Faktor eksternal berikutnya adalah perkembangan teknologi ESDM yang semakin maju dengan bobot sebesar 0,1 dan rating sebesar 3 sehingga skor bobotnya sebesar 0,3. Kemajuan teknologi yang terjadi berdampak positif pada perkembangan teknologi di semua sektor ekonomi, terutama dalam hal ini teknologi bidang ESDM. Faktor peluang lainnya adalah jumlah penduduk

sebagai subjek dan objek pembangunan yang meningkat setiap tahun dengan bobot skor 0,16. Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi yang meningkat setiap tahunnya diharapkan banyaknya pelaksana pembangunan dalam bidang ESDM.

2) Ancaman

Faktor eksternal sebagai ancaman utama adalah Serangan wabah penyakit dan krisis ekonomi dengan masing-masing skor bobotnya sebesar 0,3. Salah satu ancaman dalam perencanaan pembangunan di bidang ESDM adalah adanya penggalian bahan tambang liar oleh masyarakat umum dan swasta. Selain itu, ancaman lainnya adalah kenaikan harga BBM dan krisis ekonomi menyebabkan penurunan hasil produksi pertambangan karena banyaknya pengusaha yang gulung tikar (bangkrut) dan juga penurunan permintaan akan barang tambang. Selanjutnya adalah lemahnya penguasaan pasar, dengan bobot skor diperoleh sebesar 0,18. Lemahnya penguasaan pasar menyebabkan hasil produksi tambang penjualannya bersifat kompetitif dan terkadang harga barang tambang turun akibat persaingan tersebut. Kondisi ini mempengaruhi pendapatan daerah dari hasil penjualan (eskpör), karena adanya persaingan dengan swasta yang memiliki pasar sendiri.

Banyaknya kompetitor dari pengusaha lokal maupun internasional dengan bobot sebesar 0,07 dan diberi rating sebesar 2, yang berarti faktor tersebut merupakan ancaman yang lumayan besar dan memiliki kepentingan lumayan tinggi untuk pengembangan dan pembangunan bidang ESDM, dengan nilai yang dibobot diperoleh sebesar 0,14. Dengan banyaknya kompetitor tentu akan menurunkan nilai jual harga barang tambang sehingga dapat menurunkan PAD Kabupaten Kuantan Singingi.

7. Penentuan Strategi Prioritas Dalam Perencanaan Program Pembangunan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi

Penentuan strategi prioritas dalam perencanaan program pembangunan bidang ESDM dilakukan dengan melakukan pemetaan terlebih dahulu yang terdiri dari 4 kuadran. Kuadran 1: mendukung strategi agresif, kuadran 2: mendukung strategi diversifikasi,

kuadran 3: mendukung strategi turn-around dan strategi 4: mendukung strategi defensif. Penentuan strategi ini dilakukan dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal Kekuatan dan Kelemahan. Masing-masing skor bobot dari faktor strategis internal dan eksternal dijumlahkan. Hasil penjumlahan tersebut nantinya digunakan untuk menentukan kekuatan dalam menentukan prioritas program pembangunan bidang ESDM dengan strategi-strategi yang dihasilkan dari perbandingan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Hasil penjumlahan skor bobot dari masing-masing faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut.

1. Kekuatan :1,24
2. Kelemahan :1,14
3. Peluang :1,93
4. Ancaman :0,92

$$\text{Sumbu } x : S + W: 1,24 - 1,14 = 0,1$$

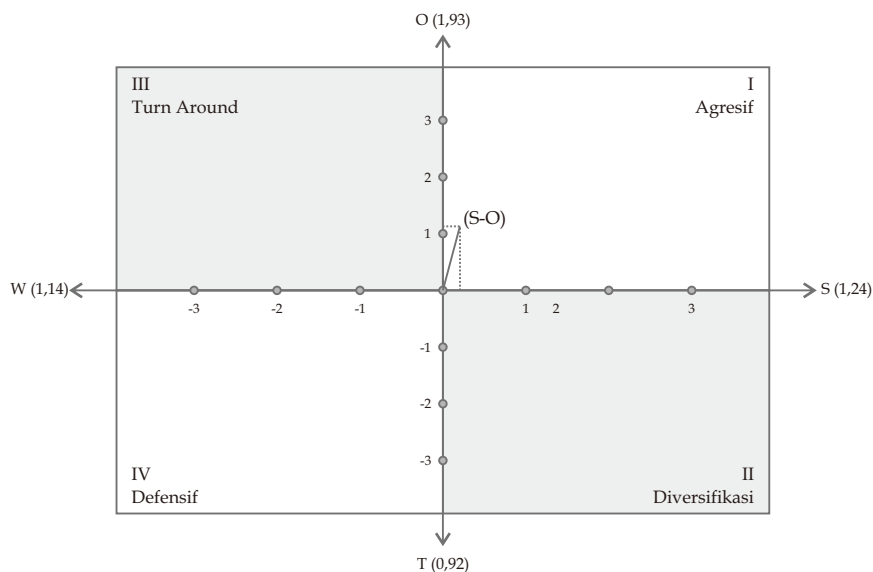
$$\text{Sumbu } y : O + T: 1,93 - 0,92 = 1,01$$

Ilustrasi dapat dilihat pada Gambar 1.

Berdasarkan peta kekuatan dalam perencanaan strategis Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis berada pada situasi strategi agresif, dimana dalam perencanaan strategi Dinas ESDM yaitu memanfaatkan kekuatan untuk mengisi peluang yang ada dalam penentuan program prioritas Dinas ESDM. Oleh karena itu, Dinas ESDM harus melaksanakan secara agresif strategi S-O. Strategi-strategi yang merupakan hasil dari analisis faktor kekuatan dan peluang (S-O) tersebut adalah:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan potensi ESDM.
- b. Peningkatan Pembangunan sarana infrastruktur ESDM.
- c. Peningkatan kemitraan dalam Pengelolaan ESDM.

Dari pemetaan yang telah berhasil diidentifikasi (S-O), maka tahap selanjutnya dilakukan pengukuran tingkat kestrategisan masing-masing strategi yang telah berhasil diidentifikasi (S-O) dengan menggunakan Litmus Test untuk mengetahui skala prioritas strategi yang harus didahulukan. Penilaian yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melibatkan aparat yang menduduki



Gambar 1.
Grafik Pemetaan Dalam Perencanaan Strategis
Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi

posisi kunci dalam pengambilan keputusan yaitu Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara wawancara. Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil Litmus Tes dan berdasarkan perhitungan skor maka dari 3 strategi ternyata “Intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan potensi ESDM” yang dikategorikan sangat strategis. Artinya dari 3 strategi (S-O) yang menjadi prioritas utama program perencanaan pembangunan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi adalah melakukan strategi Intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan potensi ESDM.

Pembahasan Hasil Pemetaan Kekuatan Dalam Perencanaan Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil pemetaan tentang isu-isu paling strategis dalam perencanaan strategis Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi, teridentifikasi strategi-strategi yang dapat dijadikan sebagai pola tujuan, program, tindakan atau keputusan yang menegaskan bagaimana, apa yang akan dikerjakan, dan mengapa harus dilakukan oleh Dinas ESDM dalam rangka program prioritas bidang ESDM. Adapun penjabaran strategi yang telah ditemukan melalui identifikasi dari hasil pemetaan di atas dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Strategi Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pemanfaatan Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan kawasan tumbuh yang ditandai dengan berbagai permasalahan yang kompleks. Kompleksitas permasalahan yang multidimensi tersebut pun dihadapi oleh sektor pertambangannya, hal ini ditandai dengan semakin maraknya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi. Persoalan pertambangan (sumberdaya mineral dan batubara) di Kabupaten Kuantan Singingi akan makin kompleks dan rumit bila tidak segera dibenahi dan ditempatkan pada jalur (track) yang tepat. Untuk itu Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas ESDM, perlu melakukan berbagai perubahan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertambangan secara optimal. Dalam merumuskan program kerjanya untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi berupa eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, Dinas ESDM perlu melakukan langkah-langkah kerja yang komprehensif dan bertanggung jawab atas keamanan dan menjaga lingkungan. Langkah awalnya adalah melakukan studi potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi seperti studi potensi batubara di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Kompleksitas permasalahan akan makin bertambah seiring dengan paradigma pertumbuhan sebuah kota Kabupaten. Dalam rangka menunjang usaha pembangunan yang berwawasan lingkungan, kiranya perlu diketahui secara pasti potensi sumber daya pertambangan yang dimiliki suatu daerah. Daya ini setelah dipergunakan (diambil)

tidak dapat diperbarui lagi (non renewable) atau dengan kata lain akan dapat habis pada suatu saat. Oleh karena itu pemanfaatannya haruslah secara efektif dan efisien. Untuk mengantisipasi ini maka perlu akan adanya suatu studi/kajian potensi pertambangan (menginventarisasi, lokasi penyebarannya dan jumlah cadangan yang ada) di Kabupaten Kuantan Singingi. Kebutuhan akan informasi data yang lengkap, akurat dan mutakhir tentang potensi bahan galian tambang, merupakan hal yang sangat diperlukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengetahui aset (kekayaan) dan modal dasar untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan pengolahan sumberdaya energi dan sumber daya mineral. Informasi demikian juga sangat berguna bagi usahawan maupun praktisi yang berminat atau berkecimpung dalam pengembangan sumber daya pertambangan.

- Studi/kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan informasi spasial tematik yang mutakhir dan akurat yang dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan pembangunan. Studi ini memiliki 4 (empat) tujuan dan sasaran spesifik seperti di bawah ini:
- Pemutakhiran peta (map updating) penggunaan lahan skala 1:250.000, dengan detail informasi spasial dan survei lapangan terbaru.
- Pembuatan peta-peta tematik, topografi, peta geologi, peta potensi pertambangan dan sumber energi. Pembuatan peta tematik dalam studi ini juga akan dilakukan pemetaan obyek fisik lahan, seperti pemetaan topografi yang menggambarkan morfologi wilayah.
- Tersedianya data spasial yang mutakhir/terbaru dengan menggunakan teknik pemutakhiran dan metode penginderaan jauh yang di lengkapi dengan survei lapangan serta data sekunder terkait yang mendukung.
- Tersedianya basis data dasar spasial yang mencerminkan kondisi fisik lahan wilayah Kecamatan. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah pemetaan nasional (Bakosurtanal) dalam skala yang memadai (1: 50.000).
- Ketersediaan data tentang potensi sumber daya mineral tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai acuan teknis bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya energi, antara lain untuk:

- Pemberian izin pertambangan daerah (SIPD).
- Kebijakan, konservasi sumber daya mineral dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Data dan informasi tentang potensi sumber daya pertambangan bagi masyarakat luas yang memerlukannya.
- Bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah, terutama guna tercapainya penggunaan lahan yang berkelanjutan.
- Dari segi wilayah, intensifikasi eksplorasi dilakukan melalui peningkatan kegiatan survei umum geologi/geofisika dan pembukaan wilayah kerja baru khususnya di daerah yang belum pernah dieksplorasi maupun daerah laut dalam yang pada saat ini telah tersedia teknologi eksplorasinya. Disisi lain aktifitas eksplorasi yang umumnya terdapat di Indonesia yang selama ini belum dilakukan dengan menerapkan konsep eksplorasi baru, khususnya dilakukan pada lapisan Pra Tersier dan wilayah laut dalam. Intensifikasi eksplorasi di Kuantan Singingi belum dilakukan terhadap potensi gas metana batubara (*coalbedmethane/CBM*) dan *gas hydrate* yang keberadaannya tersebar diberbagai cekungan sedimen Tersier dan wilayah laut dalam dengan nilai cadangan yang cukup menjanjikan.

Sedangkan ekstensifikasi eksplorasi dilakukan dalam rangka keamanan suplai energi jangka panjang sehingga dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri ekstensifikasi eksplorasi terutama diarahkan ke daerah-daerah terpencil yang pada umumnya kurang infrastruktur. Dengan adanya usaha intensifikasi dan ekstensifikasi potensi ESDM maka diharapkan hasil produksi bahan tambang dan energi akan meningkat dari segi jumlah, kualitas maupun keragaman produk energi yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan dan pembangunan bidang ESDM tersebut. Meningkatnya kegiatan pengembangan disertai dengan peningkatan produksinya, tentu akan meningkatkan pendapatan daerah dari hasil aktivitas jual beli baik lokal maupun ekspor.

2. Strategi Peningkatan Pembangunan sarana infrastruktur Energi dan Sumber Daya Mineral.

Salah satu aspek yang mengalami perubahan dalam proses pembangunan adalah aspek fisik wilayah. Pembangunan wilayah merupakan

pembangunan ekonomi dengan mempertimbangkan variabel tempat dan waktu. Karakteristik fisik dan sosial wilayah di Indonesia beragam memberikan berbagai potensi wilayah berbeda. Perbedaan potensi wilayah di Indonesia menyebabkan kesenjangan yaitu: kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar desa dan kota kesenjangan antara golongan pendapatan. Infrastruktur (sarana dan prasarana) pada suatu wilayah sangat mempengaruhi perkembangan wilayah tersebut. Wilayah yang infrastrukturnya baik akan lebih berkembang, sedangkan wilayah yang infrastrukturnya kurang baik relatif tertinggal. Sektor unggulan yang akan diprioritaskan untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan wilayah akan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup untuk mendukung aktivitas perekonomian wilayah. Begitu pula dengan pembangunan bidang ESDM di Kabupaten Kuantan Singingi memerlukan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan eksplorasi dan penggalian sumber energi dan pertambangan. Kegiatan awal penambangan berupa menyediakan segala sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penambangan, seperti membuat jalan masuk ke lokasi, terowongan, menyediakan alat-alat galian sampai penggalian tanah penutup.

Selain itu dalam bidang ketenagalistrikan, perlu adanya pembangunan infrastruktur pembangkit, penyalur dan distribusi listrik di Kabupaten Kuantan Singingi. Persoalan utama yang menghambat peningkatan akses pada energi listrik adalah kondisi Kabupaten Kuantan Singingi saat ini yang hampir 37% penduduknya masih tinggal di daerah pedesaan yang belum mendapatkan pasokan listrik. Hal ini dikarenakan daerah-daerah tersebut memiliki karakteristik beban yang tersebar dan relatif kecil sehingga belum layak jika dipasok dengan pembangkit listrik skala besar. Mayoritas daerah dengan karakteristik seperti ini terletak di luar sistem kelistrikan Sumbar-Riau dan daerah yang belum terkoneksi (*off grid*).

Permasalahan kelistrikan untuk daerah-daerah di luar sistem kelistrikan Sumbar-Riau dan daerah yang belum terkoneksi (*off grid*) bukan hanya penyebaran lokasinya tetapi investasi pengadaannya. Karena itu sebuah kebijakan yang tidak meletakkan aspek komersial sebagai titik tekan diperlukan untuk daerah-daerah ini. Pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah pedesaan adalah salah satu

target pembangunan kelistrikan dalam Program Pembangunan Jangka Menengah Republik Indonesia 2009- 2014. Target rasio elektrifikasi desa pada akhir tahun 2014 sebesar 97 %. Begitu pula dengan kondisi di Kabupaten Kuantan Singingi, dimana pemerintah Kabupaten Singingi melalui Dinas ESDM berupaya untuk meningkatkan pelayanan kelistrikan bagi masyarakatnya. Namun kendala yang ada saat ini adalah kurangnya investasi pembangunan infrastruktur pembangkit dan penyalur listrik bagi masyarakatnya.

Selain itu konsep dan asumsi kelayakan ekonomi dan finansial harus ditinjau kembali guna memperjelas kelayakan proyek pembangunan kelistrikan khususnya di daerah perbatasan, terpencil dan pedesaan. Dari sisi kelembagaan juga masih memerlukan pembaharuan kebijakan mengingat institusi yang melaksanakan pembangunan kelistrikan non komersial/ sosial hanya PT. PLN. Meskipun pemerintah sebagai regulator melalui DJLPE-Dep Energi dan Sumber Daya Mineral telah menginisiasi perangkat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik yang di Pasal 2A menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil, perbatasan antar negara dan pembangunan listrik perdesaan. Agar perangkat peraturan ini optimal diperlukan kebijakan pendukung yang berlandaskan konsep kesinambungan (*sustainability*), kelayakan finansial serta dampak dan pengaruh kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang positif.

Perencanaan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia, khususnya Kabupaten Kuantan Singingi direncanakan berbentuk penerapan pembangkit listrik dengan energi terbarukan. Infrastruktur ini akan dikembangkan di daerah terpencil di Kabupaten Kuantan Singingi, terutama di daerah pedesaan yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN. Energi-energi terbarukan yang akan dimanfaatkan antara lain energi surya, angin, dan mikro hidro serta sistem pembangkit energi lainnya. Penggunaan energi terbarukan sebagai sumber tenaga listrik adalah sasaran pembangunan

sektor kelistrikan dalam Program Pembangunan Jangka Menengah 2009 – 2014.

Pengembangan infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil sejalan dengan salah satu misi sektor ketenagalistrikan menurut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1213 K/ 31/ MEM/ 2005 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang menyatakan bahwa: "untuk kelistrikan desa dan daerah terpencil yang memerlukan tenaga listrik dalam skala kecil diprioritaskan membangkitkan tenaga listrik dari energi terbarukan". Misi ini dipertajam melalui kebijakan kelistrikan nasional tentang penanganan listrik desa dan misi sosial yang menyatakan bahwa penanganan misi sosial dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan bantuan bagi masyarakat tidak mampu, menjaga kelangsungan Upaya perluasan akses pelayanan listrik pada wilayah yang belum terjangkau listrik, mendorong pembangunan/ pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kabid Energi Dinas ESDM menyangkut strategi peningkatan sarana dan prasarana ESDM yang mengatakan bahwa:

Untuk menunjang kegiatan pembangunan bidang ESDM tentu harus dipersiapkan sarana dan prasarana yang memadai seperti untuk pertambangan perlu adanya sarana untuk membuat jalan masuk ke lokasi, terowongan, menyediakan alat-alat galian sampai penggalian tanah penutup. Untuk kegiatan penyediaan listrik perlu adanya infrastruktur pembangkit dan penyalur listrik. Namun penyediaan sarana ini memang belum optimal, dimana masih banyak desa di Kabupaten Kuantan Singingi belum tersentuh listrik. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran dalam penyediaan sarana infrastruktur pembangkit dan penyalur listrik. Dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana/ infrastruktur bidang energi dan sumber daya mineral tentunya akan meningkatkan pelayanan ketersediaan sumber energi dan merial yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi

3. Strategi Peningkatan kemitraan dalam Pengelolaan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Implikasi kebijakan dari sektor pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan mendorong tumbuh dan kembangnya usaha dibidang pertambangan

umum, energi, dan sumberdaya mineral. Perlu adanya pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan dengan tersedianya data pertambangan umum secara akurat dan valid, serta perlu adanya kegiatan yang dapat menambah pengetahuan masyarakat atau pemerintah daerah sendiri dengan diadakannya diklat/kursus teknis bidang pertambangan agar potensi sumberdaya alam yang ada tidak di sia-siakan dan hanya diberikan kepada investor yang ada atau perusahaan saja yang mengelola. Pengetahuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia juga diperlukan untuk pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan tidak merusak lingkungan serta peningkatan kualitas tenaga kerja yang ahli dibidang pertambangan, mengembangkan secara terpadu sektor pertambangan dan penggalian melalui peningkatan penguasaan teknologi, peningkatan produksi dan penganekaragaman hasil tambang termasuk upaya pengelolaan untuk komoditas tambang, eksplorasi sumberdaya mineral, penyelidikan bahan galian dan sebagainya.

Dengan adanya implementasi kebijakan dari sektor pertambangan juga diperlukan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan agar terwujudnya pertambangan rakyat secara tertib. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat harus di data secara valid agar tidak merugikan masyarakat sekitar daerah pertambangan tersebut. Khususnya tambang emas yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi masih dikelola oleh masyarakat setempat dan belum ada peranan dari swasta. Dengan kata lain, tambang emas yang ada di kecamatan tersebut masih ilegal, belum ada kerjasama pemerintah dengan pihak swasta agar sumberdaya ini dapat dikelola dengan baik. Selain itu juga agar terwujudnya pertambangan rakyat secara tertib dengan tidak merusak lingkungan sekitar daerah pertambangan. Untuk itu, diharapkan investor yang bisa menanamkan modalnya di sektor pertambangan emas ini, dan tentunya dapat bekerjasama dengan masyarakat sekitar dan saling menguntungkan bagi perusahaan maupun masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kuantan Singingi, serta penyerapan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut.

Aktivitas penambangan liar bahan galian golongan A yakni emas makin marak di

Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, khususnya pada sepanjang bantaran Sungai Batang Taluk Kuantan ke Lubuk Jambi dan Sungai Singingi. Besarnya deposit emas di sepanjang bantaran Sungai Batang Taluk Kuantan ke Lubuk Jambi yang sejak puluhan tahun terus ditambang masyarakat tanpa adanya izin diberikan pemerintah daerah terkait. Deposit emas dalam sungai tersebut berkualitas bagus bahkan kini masih terus tersedia dengan bongkahan kecil-kecil sebesar biji bayam berwarna kuning emas. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus melakukan penertiban dan merazia namun aktivitas penambangan masih dilakukan ratusan penambang. Dengan melihat kondisi seperti itu, maka Dinas ESDM selalu instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral perlu melakukan upaya untuk mengelola langsung pertambangan liar, dengan memberdayakan masyarakat setempat serta swasta melalui hubungan kemitraan yang saling menguntungkan.

Dalam pembangunan bidang ESDM di Kabupaten Kuantan Singingi, maka bentuk kemitraan antara masyarakat, pemerintah (Dinas ESDM) dan pengusaha besar, dapat dilakukan menggunakan pola kemitraan inti-plasma, dimana pola ini merupakan hubungan antara masyarakat sebagai plasma dengan perusahaan inti/swasta yang bermitra usaha. Perusahaan inti menyediakan sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi kepada pemerintah (Dinas ESDM). Sedangkan kelompok mitra berkewajiban memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah. Dalam menjalankan kemitraan ini, maka perlu adanya dukungan dari pihak pemerintah daerah (Dinas ESDM) sebagai berikut:

- ▶ Sebagai fasilitator antara masyarakat dan pengusaha
- ▶ Melakukan pengawasan
- ▶ Memberikan ijin usaha untuk mempermudah pelaksanaan kemitraan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pernyataan dari Kepala Dinas ESDM yang mengatakan bahwa:

Kerjasama sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah (Dinas ESDM)..karena bermanfaat terutama dalam membantu permodalan dalam pengelolaan sumber daya

mineral. Anggaran Dinas ESDM, memang terbatas sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan terbatas juga. Salah satu jalannya meningkatkan kemitraan usaha dengan pengusaha atau swasta sehingga dapat membantu permodalan dalam pengelolaan sumber daya mineral. Sampai saat kemitraan terus berkembang dengan baik, banyak pengusaha beralih profesi ke bidang pertambangan dengan menggandeng masyarakat untuk menjadi mitra dalam pengelolaan sumber daya mineral di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan adanya kemitraan ini, selain membantu meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral oleh Dinas ESDM, mengurangi terjadinya penambangan liar oleh masyarakat, juga dapat meningkatkan hubungan kemitraan yang baik dan saling menguntungkan antara masyarakat, pengusaha dan juga pemerintah daerah (Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi).

E. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- ▶ Perencanaan program kerja (Renstra dan Renja) Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik, hal ini diakibatkan karena aparat perencana belum mampu memprioritaskan program kerja dan adanya interpersi dari beberapa pihak luar demi kepentingan beberapa pihak. Adapun tujuan program Dinas ESDM, tidak selalu berorientasi pada pembangunan fisik saja, namun juga pembangunan non fisik yaitu meningkatkan kemampuan aparatur sehingga pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat terwujud sesuai dengan visi-misi Dinas ESDM.
- ▶ Berdasarkan hasil tes litmus, ternyata "Intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan potensi ESDM" yang dikategorikan sangat strategis. Artinya dari 3 strategi (S-O) yang menjadi prioritas utama program perencanaan pembangunan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi adalah melakukan strategi Intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan potensi ESDM. Intensifikasi eksplorasi dilakukan melalui peningkatan kegiatan survei umum geologi serta mengoptimalkan potensi sumber daya energi seperti

pertambangan emas di Kecamatan Hulu Kuantan, karena selama ini penggalian potensi pertambangan emas belum dimanfaatkan secara optimal, malah yang ada Pertambangan Emas Ilegal (PETI). Sedangkan ekstensifikasi eksplorasi dilakukan dengan cara mengeksplorasi kawasan perairan (Sungai), karena selama ini sumber daya energi dan pertambangan lebih banyak dilakukan di wilayah daratan.

- Koordinasi dari tiap lembaga-lembaga ESDM dalam penyusunan program pembangunan tidak terkoordinir dengan baik.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil temuan penelitian ini dalam perencanaan strategis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- Untuk menanggulangi penambangan liar dan kekurangan anggaran pengelolaan bidang ESDM, maka perlu dibentuk kemitraan antara masyarakat, pemerintah daerah (Dinas ESDM) dengan pengusaha besar, dengan menggunakan pola kemitraan inti-plasma, artinya perusahaan menyediakan sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi. Pemerintah daerah (Dinas ESDM) melakukan pengawasan dan memberikan ijin usaha. Sedangkan kelompok mitra/masyarakat berkewajiban memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama.
- Perlu melakukan intensifikasi bidang ESDM seperti mengoptimalkan potensi sumber daya energi seperti pertambangan emas di Kecamatan Hulu Kuantan, karena selama ini penggalian potensi pertambangan emas belum dimanfaatkan secara optimal, malah yang ada Pertambangan Emas Ilegal (PETI) dan melakukan ekstensifikasi bidang ESDM dengan dengan cara eksplorasi, dengan cara mengeksplorasi kawasan perairan (Sungai), karena selama ini sumber daya energi dan pertambangan lebih banyak dilakukan di wilayah daratan.
- Perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah (Dinas ESDM) dengan Kementerian ESDM dalam menyelenggarakan program kerja di daerah Kabupaten Kuantan Singingi agar tidak terjadi duplikasi kegiatan yang sama oleh dua institusi (Dinas ESDM dan

Kementerian ESDM), yang mengakibatkan terjadinya pemborosan anggaran. Khusus untuk Kementerian ESDM, kalau pun ada program sebaiknya diserahkan kepada Pemerintah daerah (Dinas ESDM) dan Kementerian ESDM hanya memonitor dan mengawasi hasil dari pelaksanaan program tersebut.

REFERENSI

- Afiffudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta
- Bryson. John M. 2007. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. diterjemahkan oleh Miftahudin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handyaningrat S. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Hasibuan S.P. 2001. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Haji Masagung
- _____. S.P. 2005. *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: PT. Gunung Agung
- Jhinghan ML. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Julianto. 1996. *Pengaruh Kepemimpinan dan Kualitas Sumber Daya Aparat Pemerintah Desa Terhadap keberhasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Kreitner R. 1989. *Management*. Seeon Edition, Boston Houghton Mifflin Company.
- Kusmiadi. 1995. *Teori dan Teknik Perencanaan*, Bandung: Ilham Jaya
- Mulyadi D. 2005. *Strategi Pembuatan Keputusan Melalui Teori Organisasi dan Manajemen*, Bandung: Mutiara Ilmu.
- Muhamad. Suwarsono. 2005. *Manajemen Strategik Konsep, Kasus*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Rangkuty. Freddy. 2009. *Analisis SWOT. Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep Perencanaan Startegis untuk menghadapi Abad 21*. Jakarta: Gramedia
- Riyadi. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Gramedia.
- Saladin. Djaslin. 2004. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*, Bandung: Linda Karya
- _____. 1997. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.
- _____. 2000. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Swasta B. 1996. *Azas-azas Manejemen Modern*, Yogyakarta: Liberty
- Tjokroamidjojo B. 1994. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- _____. 1995. *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta, Gunung Agung.
- Ukas M. 1997. *Manajemen*, Bandung: Kencana Utama.
- Winardi. 2000. *Azas-azas Manajemen*, Bandung: CV. Mandar Maju

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011-2016
Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011-2016
Kuansing Dalam Angka Tahun 2012 Kabupaten Kuantan Singingi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2011-2012